



**KEPALA DESA KEMANTREN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
PERATURAN KEPALA DESA KEMANTREN**

**NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEMANTREN TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMANTREN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Desa Kemantren Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 20214
4. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Bumdes/Bumdes Bersama
21. Peraturan Menteri desa dan Pembangunan Daerah tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Pemggunaan Dana Desa Tahun 2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor No. 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 Nomor 2 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana (Berita Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 nomor 124 seri D)

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D)
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi non tunai di desa;
32. Peraturan Bupati Malang nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
33. Peraturan Bupati Malang nomor 183 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati Malang nomor 202 tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Serta Ketua Rukun Warga
34. Peraturan Bupati Malang nomor 184 Tahun 2024 tentang Standard Biaya Umum di desa tahun 2025
35. Peraturan Bupati Malang nomor 185 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa Tahun 2025;

36. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa Badan Pemusyawaratan Desa dan Insentif ketua RT serta Ketua RW (berita Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 nomor 202 seri D);
37. Keputusan Bupati Malang nomor 188.45/963/KEP/35.07.013/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemantren Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2019 Nomor 10);
39. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2020 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemantren Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2024 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

Jumlah PADesa

Rp 135.000.000,00

1.2. Transfer

Jumlah Transfer	Rp	2.266.287.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.403.287.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Jumlah	Rp	987.061.670,82
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Jumlah	Rp	995.636.322,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
Jumlah	Rp	47.890.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Jumlah	Rp	33.650.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
Jumlah	Rp	224.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.538.547.016,06
Surplus/Defisit	Rp	114.649.007,18
3. Pembiayaan Desa		(114.649.007,18)
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
Jumlah Penerimaan	Rp	170.995.392,82
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
Jumlah Pengeluaran	Rp	285.644.400,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Kemantren.

Ditetapkan di : Kemantren

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA KEMANTREN,



Diundangkan di : Kemantren

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KEMANTREN



M CAHYO WIBOWO

Berita Desa Kemantren Tahun 2023 Nomor 5